

**THE ASEAN WAY: KEKUATAN DIPLOMASI SUNYI DI TENGAH PUSARAN
GEOPOLITIK DI ASIA TENGGARA**

**Adam Ahmad Najib, Fadila Amalia, Ilya Hanifah Hakim, Risma Aulia,
Salma Isnaeni Yusriyyah**

Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ahmadadamns@gmail.com¹, fadilaamalia86@gmail.com², ilyahanifahhakim@gmail.com³,
rismaauliaa1856@gmail.com⁴, salmaisnaeni4@gmail.com⁵

Abstrak

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, Asia Tenggara berhasil mempertahankan stabilitas kawasan melalui pendekatan diplomasi ASEAN Way. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana The ASEAN Way sebagai pendekatan diplomasi ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung pembangunan ekonomi regional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, melalui penelaahan berbagai literatur, dokumen resmi, dan hasil penelitian terkait ASEAN. Hasil menunjukkan bahwa prinsip ASEAN Way menjadi fondasi utama pengambilan keputusan ASEAN yang menghasilkan produk hukum dominan bersifat soft law. Pendekatan tersebut berhasil membangun kepercayaan antarnegara anggota dan mencegah konflik terbuka, meskipun sering dinilai lamban dalam merespons berbagai krisis. Studi kasus krisis politik Myanmar dan sengketa Laut China Selatan memperlihatkan bahwa ASEAN menghadapi keterbatasan dalam mengambil tindakan tegas, tetapi tetap berperan efektif sebagai fasilitator dialog dan manajer kawasan dalam menjaga keseimbangan diplomatik. Di bidang ekonomi, stabilitas yang terjaga mendorong harmonisasi kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta terbukti meningkatkan daya tarik investasi asing, sebagaimana tercermin dari rekor arus masuk FDI sebesar US\$ 230 miliar pada tahun 2023.

Kata kunci: ASEAN, The ASEAN Way

Abstract

Amidst rising global geopolitical tensions, Southeast Asia has successfully maintained regional stability through the ASEAN Way diplomatic approach. This article aims to analyze how the ASEAN Way, as ASEAN's diplomatic approach, plays a role in maintaining political stability and supporting regional economic development. This study employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, examining various literature, official documents, and research findings related to ASEAN. The results indicate that the principles of the ASEAN Way serve as the primary foundation for ASEAN decision-making, resulting in dominant legal products of a soft law nature. This approach has successfully built trust among member states and prevented open conflict, although it is often criticized for being slow in responding to various crises. Case studies of the political crisis in Myanmar and the South China Sea dispute demonstrate that while ASEAN faces limitations in taking decisive action, it remains an

effective facilitator of dialogue and regional manager in maintaining diplomatic balance. In the economic sphere, sustained stability has fostered policy harmonization within the framework of the ASEAN Economic Community (AEC) and has proven to enhance the appeal of foreign investment, as reflected in a record FDI inflow of US\$230 billion in 2023.

Keywords: ASEAN, The ASEAN Way

PENDAHULUAN

Dunia internasional saat ini sedang menghadapi situasi yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Konflik bersenjata di berbagai kawasan seperti perang di Ukraina, ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, hingga persaingan antara Amerika Serikat dan China juga semakin memperlihatkan bagaimana perebutan pengaruh global dapat menciptakan ketegangan yang sewaktu-waktu berubah menjadi konflik besar. Dalam situasi seperti ini, banyak kawasan di dunia hidup dalam rasa cemas terhadap ancaman perang, krisis ekonomi, hingga ketidakpastian masa depan.

Namun di tengah dunia yang semakin banyak konflik dan persaingan kekuasaan, Asia Tenggara justru memperlihatkan keadaan yang berbeda. Kawasan ini memang tidak sepenuhnya bebas masalah. Sengketa wilayah di Laut China Selatan masih terus berlangsung dan melibatkan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga memiliki perbedaan dari segi sistem politik, budaya, agama, bahasa, hingga tingkat pembangunan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, potensi konflik terbuka sebenarnya sangat mungkin terjadi. Namun hingga hari ini, kawasan Asia Tenggara tetap mampu menjaga stabilitas dan menghindari perang antarnegara anggota.

Keadaan ini tidak lahir secara kebetulan. Stabilitas kawasan dibangun melalui proses panjang dialog, kompromi, dan pembangunan rasa saling percaya antarnegara sejak ASEAN didirikan pada tahun 1967. ASEAN berhasil membangun sebuah *security community*, yaitu kondisi ketika negara-negara di dalam suatu kawasan mulai memandang perang bukan lagi sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan bersama. Perdamaian dibangun bukan melalui dominasi militer, tetapi melalui norma bersama, komunikasi politik, dan hubungan diplomatik yang terus dirawat (Acharya, 2001).

Dalam praktiknya, pendekatan ini sering disebut sebagai *quiet diplomacy* atau diplomasi sunyi. Diplomasi ASEAN bekerja melalui komunikasi tertutup, negosiasi perlahan, dan penyelesaian masalah tanpa memermalukan pihak tertentu di ruang publik. ASEAN justru terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas kawasan tanpa harus menggunakan ancaman militer atau mekanisme pemaksaan seperti organisasi regional lain (Pamungkas, 2025).

Pendekatan tersebut kemudian dikenal sebagai *The ASEAN Way*. Prinsip musyawarah, konsensus, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan non-intervensi menjadi fondasi utama hubungan antarnegara di Asia Tenggara. ASEAN lebih memilih jalur dialog dibandingkan konfrontasi, lebih mengutamakan kompromi daripada tekanan terbuka, serta lebih percaya pada proses diplomasi jangka panjang dibandingkan tindakan koersif yang cepat tetapi berisiko memecah hubungan regional.

Diplomasi ASEAN pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang hubungan antarnegara, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih manusiawi di tengah dunia yang semakin keras. Diplomasi dijalankan bukan dengan ancaman, melainkan melalui kesabaran, komunikasi, dan pencarian titik temu bersama. Dalam kajian komunikasi diplomatik ASEAN tahun 2025 dijelaskan bahwa pendekatan diplomasi ASEAN berfungsi untuk membangun konsensus, menjaga stabilitas kawasan, memperkuat *soft power*, serta memperluas kerja sama regional melalui komunikasi yang harmonis dan inklusif (Seto et al., 2025).

Namun, *The ASEAN Way* juga tidak lepas dari kritik tajam dunia internasional. ASEAN sering dianggap terlalu lamban dalam mengambil keputusan karena seluruh kebijakan harus melalui mekanisme konsensus. Organisasi ini bahkan kerap disebut sebagai *talk shop*, yaitu forum yang lebih banyak menghasilkan diskusi dibandingkan tindakan nyata. Kritik tersebut semakin kuat ketika ASEAN dianggap tidak cukup tegas menghadapi krisis politik di Myanmar maupun meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Prinsip non-intervensi dipandang membuat ASEAN tidak memiliki daya paksa terhadap negara anggota yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, banyak pihak justru melihat bahwa pendekatan yang lambat dan hati-hati tersebut merupakan kekuatan utama ASEAN. Dalam kawasan yang sangat beragam dari sisi politik, budaya, dan sejarah, pendekatan konfrontatif berpotensi memicu konflik terbuka. Oleh karena itu, ASEAN memilih menjaga stabilitas melalui dialog yang sabar, komunikasi yang inklusif, dan kompromi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mungkin tidak menghasilkan keputusan cepat, tetapi mampu menjaga kawasan Asia Tenggara tetap stabil di tengah tekanan geopolitik global yang semakin besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama. (Snyder, 2019) dalam penelitiannya mendefinisikan studi literatur sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang telah ada

terkait suatu topik tertentu yang bukan sekadar ringkasan, melainkan analisis kritis yang menghasilkan pemahaman baru dari akumulasi pengetahuan yang sudah ada. Dengan demikian, studi literatur merupakan metode yang sah secara akademik dan berdiri sendiri, bukan hanya tahap awal dari penelitian yang lebih besar.

Pemilihan metode ini didasari oleh sifat topik yang dikaji yakni peran ASEAN dalam menciptakan stabilitas kawasan dan dampaknya terhadap integrasi ekonomi yang lebih tepat dikaji melalui analisis teoritis dan empiris dari berbagai sumber akademik terdahulu daripada melalui pengumpulan data primer di lapangan. (Waruwu, 2023) menjelaskan bahwa penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan masalah, memecahkan masalah, dan mengembangkan pengetahuan baru; dan bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui *systematic literature review*, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji secara mendalam konsep dan temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga internasional seperti ASEAN Secretariat, UNCTAD, dan World Economic Forum, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan. Ridwan et al., (2021) menegaskan bahwa studi literatur memberikan dua manfaat sekaligus bagi penelitian ilmiah: pertama, sebagai fondasi argumen yang memperkuat posisi peneliti; dan kedua, sebagai sumber inspirasi untuk menemukan perspektif atau celah kajian yang belum pernah dibahas sebelumnya. Prinsip ini menjadi landasan dalam pengumpulan dan seleksi pustaka pada penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kata kunci yang relevan, antara lain: ASEAN Economic Community, regional stability, foreign direct investment, ASEAN Way, trade integration, dan labour mobility. Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar untuk sumber-sumber berbahasa Indonesia.

Tahapan analisis mengikuti prosedur yang dikemukakan oleh Waruwu, (2023) yaitu: (1) pemilihan fokus kajian, (2) pencarian informasi yang relevan, (3) pengkajian teori yang relevan dari para ahli maupun penelitian terdahulu, (4) analisis teori dan hasil penelitian secara kritis, dan (5) penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul kemudian diorganisasikan secara tematik sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan, meliputi konteks institusional ASEAN, mekanisme integrasi ekonomi melalui MEA, dan hubungan antara stabilitas kawasan dengan kepercayaan investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Mekanisme Pengambilan Keputusan ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi antarnegara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara Asia Tenggara, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Tujuan utama didirikannya untuk mempercepat perkembangan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya melalui berbagai usaha kerjasama dengan semangat persamaan (*equality*) dan kemitraan (*partnership*). Selain itu, ASEAN berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas regional dengan menjunjung tinggi keadilan serta supremasi hukum dalam interaksi antarnegara di Asia Tenggara (Koh 2009 dalam (Darwis, 2019)). Namun, pada awal berdirinya, identitas ASEAN sebagai wadah kerja sama regional sering kali dinilai ambigu dan memicu beragam interpretasi. Hal ini berbeda dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang sejak awal secara tegas memfokuskan diri pada integrasi ekonomi, sekalipun tetap memiliki agenda politik di baliknya (Bandoro, 2023).

Untuk memahami identitas dan pola interaksi tersebut, penting melihat inti dari sentralisasi diplomasi ini yang terletak pada prinsip "*ASEAN Way*", yang mengutamakan konsultasi informal, pengambilan keputusan berbasis konsensus, serta komitmen untuk tidak mencampuri urusan domestik negara anggota. Melalui pendekatan ini, keputusan diambil lewat jalur diplomasi yang menghormati kedaulatan negara dan menolak campur tangan urusan dalam negeri. Agar kesepakatan tercapai, isu-isu sensitif biasanya dikesampingkan. ASEAN lebih memilih fokus pada bidang yang disetujui bersama dengan mencari persamaan terkecil di antara perbedaan (*the lowest common denominator*). Dalam perkembangannya, Piagam ASEAN tahun 2007 kemudian memperkuat posisi ASEAN sebagai entitas hukum sekaligus menegaskan kembali prinsip-prinsip utama tersebut dalam praktik ASEAN (Affandi et al., 2026).

Mekanisme pembuatan keputusan di dalam ASEAN secara langsung membentuk sifat produk hukum yang dihasilkannya. Karena keputusan harus mengakomodasi kenyamanan semua pihak tanpa merugikan satu negara pun, regulasi yang lahir cenderung bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara kaku. Dampaknya, tidak ada sanksi tegas bagi anggota yang melanggar komitmen. Mekanisme konsensus ini pada akhirnya lebih banyak melahirkan produk hukum yang bersifat *soft law* (seperti deklarasi, MoU, rencana aksi, atau laporan) ketimbang *hard law*, meskipun organisasi ini telah menyelenggarakan ribuan pertemuan diplomatik selama bertahun-tahun (Mandala, 2025).

Kondisi ini mencerminkan pendekatan Intergovernmentalism yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam kerja sama internasional. Sebagaimana dijelaskan Stanley Hoffmann (1966) dan Andrew Moravcsik (1993), kerja sama internasional terbentuk melalui negosiasi antarnegara tanpa menghilangkan kendali pemerintah nasional atas kepentingan strategisnya. Selain itu, prinsip non-intervensi yang menjadi bagian dari ASEAN Way juga mencerminkan kuatnya konsep kedaulatan (*sovereignty*). Menurut Stephen D. Krasner (1999), kedaulatan mencerminkan otoritas tertinggi negara dalam mempertahankan kepentingan nasional dan integritas wilayahnya. Dalam konteks ASEAN, penghormatan terhadap kedaulatan ini mendorong penggunaan *quiet diplomacy* dan dialog tertutup dalam penyelesaian berbagai persoalan kawasan.

Pendekatan ini terbukti mampu menjaga stabilitas Kawasan, mencegah dominasi negara tertentu dan membangun rasa saling percaya antarnegara anggota. Namun, di sisi lain, penerapan metode tersebut juga menyebabkan tujuan reformasi awal menjadi kurang maksimal karena membatasi kemampuan ASEAN dalam menciptakan mekanisme penegakan hukum yang kuat maupun tindakan kolektif yang lebih tegas.

B. Tantangan Nyata: Uji Nyali di Myanmar & Laut China Selatan

Studi Kasus Myanmar: Ketika Non-Intervensi Bertemu Hati Nurani

Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar (*Tatmadaw*) merampas kekuasaan dan mengurung Aung San Suu Kyi. Ribuan warga sipil ditangkap, ratusan terbunuh, jutaan orang terlantar dan dunia menoleh ke ASEAN sambil bertanya: apa yang akan kamu lakukan? (BBC News, 2021). Di situlah ASEAN terjebak di antara dua pilihan yang sama beratnya: bertahan pada prinsip non-intervensi yang menjadi tulang punggung organisasi sejak 1967, atau merespons krisis kemanusiaan yang nyata di halaman rumahnya sendiri. Diam berarti dianggap membiarkan; bertindak terlalu jauh berarti menghancurkan konsensus yang dibangun selama puluhan tahun.

Jawaban ASEAN datang dalam *Five-Point Consensus* (April 2021): penghentian kekerasan, dialog inklusif, mediasi utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan lapangan. Bagi para kritikus, ini tidak lebih dari selembar kertas tanpa gigi tidak ada sanksi, tidak ada mekanisme paksa. Namun bagi mereka yang memahami logika ASEAN, ini adalah terobosan bersejarah: untuk pertama kalinya organisasi ini secara kolektif menetapkan syarat bagi perilaku satu anggotanya, bahkan mengecualikan perwakilan junta dari forum-forum tingkat tinggi. Ketika junta terbukti mengabaikan semua poin tersebut dan kekerasan terus

berlanjut, kritik terhadap ASEAN memuncak. Tapi justru di sinilah teori Institusionalisme Liberal (Keohane, 1984). relevan: institusi regional tidak selalu bisa memaksakan kepatuhan, namun perannya mendokumentasikan pelanggaran dan menjaga tekanan diplomatik tetap hidup adalah kontribusi yang tidak kecil. ASEAN sedang menjalankan apa yang (Acharya, 2001) sebut sebagai *norm localization* mengadaptasi nilai HAM global ke dalam kerangka regional yang khas, secara bertahap dan tanpa meruntuhkan seluruh bangunan konsensus yang sudah ada.

Geopolitik Laut China Selatan: ASEAN sebagai Manajer Kawasan

Bayangkan menjadi tuan rumah sebuah pesta, sementara dua tamu paling kuat di ruangan itu saling melotot dan keduanya mengklaim bahwa halaman belakang rumahmu adalah milik mereka. Itulah kira-kira situasi yang dihadapi ASEAN di Laut China Selatan. China mempertahankan klaim *nine-dash line* atas hampir seluruh perairan itu, meski Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) telah membatalkannya pada 2016. Klaim itu berbenturan langsung dengan kedaulatan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei semua anggota ASEAN. Sementara itu, Amerika Serikat terus mengintensifkan operasi kebebasan navigasi sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi Beijing. Asia Tenggara terjepit di antara dua kekuatan yang masing-masing ingin memenangkan kawasan ini tanpa mau berkompromi.

Di sinilah ASEAN memainkan peran yang paling strategis: bukan sebagai wasit yang bisa meniup peluit, melainkan sebagai *manajer kawasan* yang menjaga agar kedua kekuatan besar tidak langsung berbenturan di halaman rumahnya sendiri. Caranya lewat tiga jalur: (1) forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), yang menyediakan satu meja bagi AS dan China untuk berbicara tanpa harus saling berhadapan secara langsung; (2) proses negosiasi *Code of Conduct* (CoC) yang meski belum menghasilkan perjanjian mengikat, berfungsi sebagai katup tekanan yang mencegah eskalasi; dan (3) strategi *hedging* kolektif tidak sepenuhnya memihak salah satu pihak agar ruang gerak diplomatik dan ekonomi kawasan tetap terbuka dari dua arah. Ketika KTT ASEAN 2012 di Phnom Penh gagal menghasilkan komunike bersama untuk pertama kali dalam sejarahnya karena Kamboja memblokir bahasa yang dianggap terlalu menekan China, banyak yang menyebut ini sebagai bukti kelemahan ASEAN. Tapi sesungguhnya itu adalah bukti betapa dalam tekanan yang harus dikelola: proses yang terus berjalan, meski menyakitkan, lebih berharga dari keputusan yang cepat tapi memecah belah. Sebagaimana ditekankan Hoffmann (1966) dalam teori Intergovernmentalism, negara-negara ASEAN tidak menyerahkan kendali mereka

menggunakan ASEAN secara strategis untuk menavigasi persaingan kekuatan besar sambil tetap menjaga kedaulatan masing-masing. Dalam dunia yang semakin keras, kemampuan menjaga komunikasi tetap hidup di tengah tekanan adalah sebuah kekuatan yang nyata, meski tidak selalu terlihat.

C. Efek Domino Ekonomi: Relevansi bagi Masyarakat)

Harmonisasi Administrasi dan Standarisasi Kebijakan MEA

Dari perspektif administrasi publik dan tata kelola kelembagaan, implementasi MEA menuntut adanya penyelarasan aturan serta sinkronisasi birokrasi lintas negara. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana melakukan harmonisasi ini tanpa mengorbankan kedaulatan domestik masing-masing negara anggota yang menganggap kedaulatan sebagai harga mati. Upaya menjembatani kebutuhan integrasi ekonomi dan perlindungan kedaulatan ini diwujudkan melalui standarisasi kebijakan teknis yang bertujuan memfasilitasi aliran tenaga kerja terampil serta barang secara lebih efisien.

Menurut Yuanitasari & Muchtar (2019), harmonisasi regulasi produk dan penghapusan hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade*) merupakan pilar krusial dalam mematerialisasikan pasar tunggal ASEAN. Melalui proses administrasi yang disepakati Bersama, seperti yang tertuang dalam *ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance*, biaya transaksi perdagangan internasional dapat ditekan secara signifikan. Menariknya, koordinasi ini dilakukan tanpa perlu memaksa negara anggota mengubah hukum nasional mereka secara radikal atau ekstrem, yang mana hal ini sangat sejalan dengan konsep *intergovernmentalism* di mana kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan negara anggota, bukan pada lembaga supranasional pusat seperti Uni Eropa.

Lebih lanjut, standarisasi teknis seperti pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diharmonisasikan di tingkat regional berfungsi meningkatkan jaminan mutu, melindungi konsumen lokal, sekaligus mendorong daya saing produk domestik di pasar global (Faisal & Trsinamansyah, 2017). Proses birokrasi, perundingan, dan penyusunan regulasi bersama yang tampaknya memakan waktu bertahun-tahun ini pada hakikatnya adalah manifestasi dari penerapan *soft regionalism* (Verico & Kiki, 2013). Mengingat tingkat kesiapan ekonomi negara anggota ASEAN sangat beragam, mulai dari Singapura yang maju secara teknologi hingga negara berkembang dengan kapasitas fiskal terbatas, pendekatan yang akomodatif memberikan ruang bagi negara-negara dengan kapasitas ekonomi lebih rendah untuk melakukan reformasi administrasi dalam negeri secara bertahap. Karakteristik "lambat tapi pasti" ini mencegah

terjadinya guncangan ekonomi domestik struktural dan memastikan bahwa tidak ada negara yang merasa "dijajah" atau dipaksa oleh kemauan mayoritas.

Stabilitas Regional sebagai Modal Utama Daya Tarik Investasi

Efek domino ekonomi yang paling signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat dari model diplomasi *The ASEAN Way* adalah lahirnya stabilitas kawasan yang bertahan selama lebih dari setengah abad. Kerja sama institusional di Asia Tenggara berhasil membuktikan tesis liberal institusionalisme: bahwa aturan yang disepakati bersama mampu mengurangi risiko konflik terbuka meskipun prosesnya memakan waktu lama. Di tengah lanskap geopolitik global yang kian terfragmentasi dan kacau akibat ketegangan militer di berbagai belahan dunia, Asia Tenggara berhasil menampilkan diri sebagai oase yang aman, damai, dan dapat diprediksi.

Secara empiris, hubungan antara manajemen konflik dan pertumbuhan ekonomi ini sangat erat. (Fuddin, 2024) menemukan bahwa stabilitas politik di kawasan ASEAN merupakan variabel penentu utama yang secara signifikan dan positif menarik arus masuk investasi asing (*Foreign Direct Investment*/FDI). Pelaku usaha dan investor global cenderung menghindari wilayah dengan tingkat risiko politik yang tinggi atau mudah berubah. Karakter diplomasi ASEAN yang tenang, tidak konfrontatif, dan mengutamakan penyelesaian di balik layar (*quiet diplomacy*) berhasil menepis kekhawatiran tersebut.

Keberhasilan ASEAN bertindak sebagai "Manajer Kawasan" mampu meredam benturan kepentingan langsung antara kekuatan-kekuatan hegemonik dunia seperti Amerika Serikat dan China di halaman rumah sendiri. Keberhasilan menjaga perdamaian ini membuktikan bahwa Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) mampu bertindak sebagai jangkar yang memberikan kepastian hukum serta stabilitas bagi rantai pasok global (*global value chain*) (Prajanto, 2022).

Dampak nyata dari stabilitas makro ini tercermin secara eksplisit dalam dokumen resmi *ASEAN Investment Report 2024*. Di saat arus investasi global mengalami kelesuan dan fluktuasi tajam akibat ketidakpastian geopolitik, arus masuk FDI ke kawasan ASEAN justru mencetak rekor sejarah baru dengan menyentuh angka US\$ 230 miliar pada tahun 2023 (The ASEAN Secretariat, 2025). Angka investasi yang sangat besar ini menjadi bukti konkret bahwa mekanisme "peredam kejutan" (*shock absorber*) politik yang dijalankan ASEAN memiliki dampak linier terhadap penguatan ekonomi makro regional yang pada akhirnya membuka lapangan kerja, menstimulus transfer teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Tanpa adanya jaminan stabilitas keamanan yang dirawat lewat kelambanan yang terukur dari *The ASEAN Way*, standarisasi administrasi ekonomi secanggih

apa pun tidak akan pernah mampu meyakinkan pasar internasional untuk menanamkan modalnya di kawasan ini.

KESIMPULAN

ASEAN membangun mekanisme pengambilan keputusan melalui prinsip *ASEAN Way*, yaitu konsultasi, konsensus, dan non-intervensi. Pendekatan ini menempatkan kedaulatan negara anggota sebagai prioritas utama sehingga setiap keputusan harus disepakati bersama tanpa memaksakan kehendak pihak tertentu. Dampaknya, produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat *soft law* dan lebih mengedepankan komitmen politik dibandingkan mekanisme penegakan yang mengikat.

Mekanisme tersebut terlihat dalam penanganan krisis Myanmar dan dinamika Laut China Selatan. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa ASEAN lebih mengutamakan diplomasi, mediasi, dan pemeliharaan komunikasi dibandingkan tindakan koersif. Walaupun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan banyak pihak, pendekatan ini memungkinkan ASEAN tetap menjaga persatuan internal dan keberlanjutan kerja sama regional. *Five-Point Consensus* untuk Myanmar dan proses negosiasi *Code of Conduct* di Laut China Selatan menjadi bukti bahwa ASEAN terus beradaptasi tanpa meruntuhkan bangunan konsensus yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Secara ekonomi, pendekatan *soft regionalism* ini terbukti menghasilkan efek yang nyata bagi masyarakat. Harmonisasi regulasi dan standarisasi kebijakan MEA memperlancar arus perdagangan dan tenaga kerja terampil, sementara stabilitas kawasan yang terjaga menjadi daya tarik investasi global dibuktikan dengan rekor FDI sebesar US\$ 230 miliar pada tahun 2023.

Dengan demikian, meskipun sering dinilai lambat dan kompromistis, mekanisme pengambilan keputusan ASEAN tetap relevan karena mampu menyeimbangkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan tujuan pembangunan ekonomi bersama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. Routledge.
- Affandi, R. A., Yani, Y. M., Bainus, A., & Mursitama, T. N. (2026). *Mereformasi ASEAN Melalui Penguatan Peran Aktor Subnational melalui Teori Multi-level Governance*. Publica Indonesia Utama.
- Bandoro, B. (2023). ASEAN dan Institusionalisasinya. *Journal CSIC*, 16.
- BBC News. (2021). *Kudeta Myanmar: Kisah-kisah pengorbanan dan ketakutan dari jalanan*. BBC News Indonesia.

- Darwis. (2019). *INDONESIA & ASEAN: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi*. Unhas Press.
- Faisal, P., & Trsinamansyah, P. (2017). *Urgensi implementasi sni produk/barang dalam rangka masyarakat ekonomi asean*. 2(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.10>
- Fuddin, M. K. (2024). *The Role of Performance Political Stability and Macroeconomic Attracting Foreign Direct Investment in ASEAN*. 19(1), 107–121.
- Keohane. (1984). *No Title After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Mandala, S. (2025). *Pengantar Hukum ASEAN*. CV Ananta Vidya.
- Pamungkas, P. W. (2025). *ASEAN: Diplomasi Sunyi, Tapi Dampak Nyata*. Kompasiana.
- Prajanto, B. (2022). IMPACT OF ASEAN ECONOMIC INTEGRATION ON INVESTMENT IN THE ASEAN REGION. *Jurnal Asia Pasific Student*, 6.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 02.
- Secretariat, T. A. (2025). *ASEAN Investment Report 2024. October 2024*.
- Seto, M. K., Nurarin, Z., Wicaksono, T., Naufal, M., Gabe, N., & Panjaitan, S. (2025). *PRAKTIK KOMUNIKASI DIPLOMATIK ASEAN DALAM PERTEMUAN MULTILATERAL : ANALISIS TEORI DIPLOMASI DAN BAHASA DIPLOMASI*. 649–670.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology : An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Verico, & Kiki. (2013). *Munich Personal RePEc Archive The Economic Integration of ASEAN + 3 The Economic Integration of ASEAN + 3* : 43801.
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. 7, 2896–2910.
- Yuanitasari, D., & Muchtar, N. (2019). *Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 25(3), 538–559. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art6>